

ABSTRAK

Muh Akbar, Burhanuddin Dan Nurbiah Tahir, Kebijakan Penggunaan Lahan Sebagai Tempat Wisata Di Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa

Kebijakan penggunaan lahan sebagai tempat wisata di Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa. Kawasan ini dikenal memiliki potensi wisata alam yang tinggi, namun di tengah perkembangan pariwisata yang pesat, muncul berbagai tantangan terkait pengelolaan lahan, seperti alih fungsi lahan pertanian, ketimpangan distribusi manfaat ekonomi, hingga potensi kerusakan lingkungan. Evaluasi dilakukan dengan mengacu pada lima indikator evaluasi kebijakan dari William N. Dunn, yaitu: efektivitas, kecukupan, kesetaraan, responsivitas, dan ketepatan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti dinas terkait (Dinas Pariwisata, Dinas PUPR), pemerintah kecamatan, dan masyarakat lokal, serta melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kebijakan penggunaan lahan untuk pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong telah cukup efektif dalam memanfaatkan karakteristik geografis wilayah yang mendukung pengembangan wisata berbasis alam dan pertanian. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih belum optimal karena tidak seluruh lokasi wisata terdaftar secara resmi dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARD). Dari segi kecukupan, alokasi lahan wisata hanya mencakup sekitar 5–10% dari total wilayah dan fasilitas penunjang seperti toilet, tempat sampah, serta akses jalan masih terbatas, terutama di destinasi baru. Dalam hal kesetaraan, meskipun masyarakat memiliki akses sebagai pengunjung dan tenaga kerja, belum semua terlibat sebagai pelaku usaha karena keterbatasan pemahaman terhadap peruntukan lahan dan dukungan modal. Responsivitas pemerintah juga dinilai belum maksimal karena lemahnya koordinasi antar lembaga serta lambatnya pembaruan dokumen perencanaan. Adapun ketepatan kebijakan masih perlu diperbaiki terutama dalam hal perlindungan lingkungan, pengendalian konflik lahan, serta kejelasan zonasi ruang melalui penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal sebagai pelaku utama wisata, percepatan penyusunan RDTR, serta peningkatan pengawasan terhadap alih fungsi lahan agar pengembangan pariwisata di Kecamatan Tinggimoncong dapat berlangsung secara adil, terencana, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Evaluasi kebijakan, penggunaan lahan, pariwisata, Kecamatan Tinggimoncong, William N. Dunn.